

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan luar negeri Iran terhadap isu Palestina bukan sesuatu yang statis, melainkan terus berubah seiring pergantian kepemimpinan di Teheran. Sejarahnya cukup kontras, dari corak Evangelistic Khamenei yang doktriner dalam menyebarkan ideologi revolusi, bergeser ke gaya Charismatic Rafsanjani yang bertumpu pada visi besar pembangunan, kemudian melunak lewat pendekatan Accommodative Khatami yang mengedepankan dialog peradaban, sampai kembali memanaskan dalam corak Expansionist yang konfrontatif di era Ahmadinejad. Di tengah rangkaian ini, kehadiran Hassan Rouhani terasa sebagai anomali yang menarik untuk dicermati, ia berhasil menarik kembali diplomasi Iran ke jalur yang lebih legalistik tanpa harus meninggalkan akar ideologis negaranya. Dengan mempertemukan teknik anamnesis Jerrold Post dan kerangka *Leadership Trait Analysis* (LTA) Margaret Hermann, penelitian ini berupaya membedah lebih dalam bagaimana narasi psikobiografi seorang pemimpin bisa bertransformasi menjadi keputusan politik yang konkret, bukan sekadar berhenti pada analisis statistik semata.

Karakter idiosinkratik Rouhani yang ditempa oleh latar belakang pendidikan hukum internasional di Barat serta pengalaman panjangnya di birokrasi keamanan nasional, tampak menjadi variabel yang cukup menentukan dalam mengubah pendekatan Iran, dari pola konfrontatif-ideologis menjadi diplomasi yang lebih pragmatis dan legalistik. Pengaruh personal ini terlihat lewat tiga temuan utama. Pertama, adanya tantangan terukur terhadap kendala yang ada (*calculated challenge*). Meski beberapa literatur kerap melabeli Rouhani sebagai pemimpin yang patuh pada batasan, hasil analisis

LTA justru menunjukkan efikasi politiknya tinggi (*High BACE*). Ia tidak bersikap pasif meski ekonomi Iran babak belur akibat sanksi; sebaliknya, tekanan itu ia jadikan panggung untuk mendikte agenda Palestina di forum multilateral guna menekan risiko isolasi nasional, membuktikan bahwa menantang dominasi global tidak selalu harus lewat retorika perang, tapi bisa lewat penguasaan mekanisme hukum internasional.

Kedua, Rouhani menunjukkan inklusivitas narasi lewat kapasitas kognitif yang kompleks, yang memungkinkannya melihat konflik Palestina bukan sekadar benturan senjata, melainkan persoalan kemanusiaan universal. Cara pandang ini membuat Iran di bawah Rouhani mampu merangkul dukungan dari aktor lintas blok dan pemimpin lintas iman, termasuk lewat kunjungannya ke Vatikan untuk menggalang solidaritas bagi kedaulatan Palestina. Ketiga, ada pragmatisme strategis lewat manajemen hubungan (*relationship focus*) yang berorientasi pada perlindungan kelompok. Rouhani menjalankan strategi ganda, di satu sisi mengejar legitimasi lewat norma internasional untuk menyudutkan Israel secara diplomatik, di sisi lain tetap waspada terhadap potensi pengkhianatan aktor luar (*high distrust*), kewaspadaan yang mendasari konsistensinya mendukung pertahanan asimetris lewat IRGC sebagai satu paket kebijakan yang tak terpisahkan, demi menjaga posisi tawar Iran tetap solid di meja perundingan.

Secara keseluruhan, tipe kepemimpinan Incremental yang melekat pada Rouhani menunjukkan bahwa faktor idiosinkratik seorang presiden mampu membuka ruang fleksibilitas bagi negara, sekalipun struktur kekuasaan yang menaunginya relatif kaku. Di bawah kepemimpinannya, dukungan Iran terhadap Palestina tidak lagi tampil sebagai instrumen perlawanan militeristik yang gegabah, melainkan bagian dari strategi diplomasi yang rasional, terukur, dan berpijak pada kepentingan nasional yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor idiosinkratik

Hassan Rouhani tercermin dari kombinasi efikasi politik yang tinggi, kompleksitas kognitif yang luas, dan orientasi relasional yang kuat bukan sekadar pelengkap, melainkan variabel yang secara nyata mempengaruhi arah kebijakan luar negeri Iran terhadap Palestina: mengarahkannya dari jalur konfrontasi terbuka menuju jalur diplomasi bertahap dan legalistik, tanpa pernah mengorbankan komitmen ideologis dasar yang telah lama dipegang Republik Islam Iran.

5.2 Saran

Penulis menyadari bahwa penerapan metode kualitatif dalam menentukan skor LTA membuka celah subjektivitas, terutama bila dibandingkan dengan penggunaan perangkat lunak otomatis seperti *Profiler Plus* yang memungkinkan skoring dibandingkan secara statistik terhadap *norming group* pemimpin dunia lainnya. Keterbatasan ini turut diperbesar oleh minimnya akses bagi penulis untuk melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri Iran sebuah kendala yang lazim dihadapi penelitian tentang rezim tertutup seperti Iran, di mana akses terhadap pengambil keputusan maupun dokumen internal sangat terbatas bagi peneliti dari luar negeri. Untuk memitigasi keterbatasan ini, penulis mengandalkan teknik triangulasi data, menyandingkan teks pidato dengan tindakan nyata pemimpin serta literatur akademik pembanding, guna menjaga validitas dan reliabilitas analisis sejauh yang dapat dicapai lewat sumber sekunder dan tersier. Karena itu, bagi peneliti selanjutnya yang memiliki akses lebih luas, baik lewat wawancara dengan mantan pejabat, diplomat, maupun pengamat yang pernah berinteraksi langsung dengan lingkaran pengambil kebijakan Iran, pengembangan dan penyempurnaan metode kualitatif pada instrumen LTA sangat disarankan untuk terus dilakukan. Kemampuan menangkap nuansa kontekstual dan latar belakang psikobiografi, sebagaimana

ditunjukkan penelitian ini, terbukti mampu memberikan interpretasi yang lebih tajam, mendalam, dan manusiawi dalam membedah kebijakan sebuah negara, sesuatu yang sulit sepenuhnya digantikan oleh skoring otomatis semata.

Selain itu, studi komparatif dengan pemimpin Iran pada periode berbeda, seperti Ebrahim Raisi atau kembali menelaah Mahmoud Ahmadinejad secara lebih mendalam, akan memperkaya pemahaman mengenai sejauh mana faktor idiosinkratik dapat bergeser secara radikal atau justru bertahan lintas kepemimpinan dalam mempengaruhi arah kebijakan luar negeri. Terakhir, bagi para praktisi diplomasi, penelitian ini menegaskan pentingnya menempatkan profil psikologis individu pemimpin sebagai variabel krusial dalam proses negosiasi internasional. Mengingat rasionalitas dan karakter personal kerap menjadi penentu utama pengambilan keputusan strategis di tengah situasi krisis global, pemahaman terhadap aspek idiosinkratik ini dapat menjadi kunci keberhasilan diplomasi antar negara.